



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 2027-2042

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Pengaruh Dan Tantangan Pendidikan Agama Islam Dalam Dinamika Politik Di Indonesia

Siti Khamim<sup>1✉</sup>, Iswantir<sup>2</sup>, Nuryanti Siregar<sup>3</sup>, Yusri Yaldi<sup>4</sup>

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email: [Sitikhamim1985@gmail.com](mailto:Sitikhamim1985@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Artikel ini menganalisis peran pendidikan agama Islam dalam konteks politik Indonesia. Pendidikan agama Islam telah memainkan peran signifikan dalam membentuk pandangan politik dan sosial masyarakat Indonesia. Dalam kerangka ini, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh pendidikan agama Islam terhadap dinamika politik di Indonesia serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan ajaran agama dengan kebutuhan sebuah negara pluralistik. Melalui tinjauan literatur yang komprehensif dan analisis mendalam, artikel ini mengidentifikasi beberapa aspek penting dari pengaruh pendidikan agama Islam terhadap proses politik di Indonesia. Hal ini meliputi pengaruh terhadap pemahaman nilai-nilai demokrasi, partisipasi politik, pembentukan kebijakan, serta dinamika sosial masyarakat. Selain itu, artikel ini juga menyoroti tantangan-tantangan yang timbul seiring dengan pengaruh pendidikan agama Islam dalam dinamika politik. Diantaranya adalah upaya untuk menjaga kesetaraan dan keadilan di tengah keragaman masyarakat, menghadapi polarisasi politik yang berpotensi merusak stabilitas sosial, serta menanggapi dinamika global yang dapat memengaruhi paradigma pendidikan agama Islam di Indonesia. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya menggambarkan peran penting pendidikan agama Islam dalam politik Indonesia, tetapi juga mengidentifikasi tantangan-tantangan yang harus diatasi untuk memastikan bahwa pendidikan agama Islam berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang inklusif dan demokratis di Indonesia.

Kata kunci : *Pengaruh; Tantangan; Pendidikan Agama Islam; Dinamika; Politik di Indonesia*

## Abstrack

This article analyzes the role of Islamic religious education in the Indonesian political context. Islamic religious education has played a significant role in shaping the political and social views of Indonesian society. Within this framework, this article aims to explore the influence of Islamic religious education on political dynamics in Indonesia as well as the challenges faced in integrating religious teachings with the needs of a pluralistic country. Through a comprehensive literature review and in-depth analysis, this article identifies several important aspects of the influence of Islamic religious education on the political process in Indonesia. This includes the influence on understanding democratic values, political participation, policy formation, and the social dynamics of society. Apart from that, this article also highlights the challenges that arise along with the influence of Islamic religious education in political dynamics. Among them are efforts to maintain equality and justice amidst the diversity of society, facing political polarization which has the potential to damage social stability, and responding to global dynamics which can influence the paradigm of Islamic religious education in Indonesia. Thus, this article not only illustrates the important role of Islamic religious education in Indonesian politics, but also identifies the challenges that must be overcome to ensure that Islamic religious education contributes to the formation of an inclusive and democratic society in Indonesia.

Keywords: *Influence; Challenge; Islamic education; Dynamics; Politics in Indonesia*

## PENDAHULUAN

Sebuah institusi keagamaan atau kemasyarakatan sepertinya tidak dapat terlepas dari pengaruh perkembangan situasi sosial-politik yang tengah berlangsung dalam masyarakat (A. Malik fajar dalam M. Wahyuni Nafis;1995). Keterkaitan ini muncul karena setting sosial-politik memiliki peran yang signifikan dalam membentuk karakter dan kelangsungan hidup suatu institusi. Fenomena ini juga mencakup pranata sosial lainnya, termasuk dalam konteks ini, pendidikan Islam baik dari segi sistem maupun lembaga. Penting untuk diakui bahwa dinamika sosial-politik masyarakat memiliki dampak yang mendalam terhadap institusi keagamaan. Situasi politik yang berkembang dapat memberikan warna dan konteks bagi eksistensi serta fungsi institusi tersebut. Sebagai contoh, regulasi keagamaan, pandangan masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan, dan arah kebijakan pemerintah dapat membentuk realitas di mana institusi keagamaan beroperasi. Pendidikan Islam, sebagai bagian integral dari pranata sosial, juga tidak lepas dari dinamika tersebut. Sistem pendidikan Islam dan lembaga-lembaganya tidak hanya mencerminkan nilai-nilai keagamaan, tetapi juga tercermin dalam respons terhadap perubahan sosial-politik. Adanya perubahan dalam situasi politik dapat memengaruhi kebijakan pendidikan, kurikulum, dan metode pengajaran yang diadopsi oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam.

Dengan memahami hubungan yang kompleks antara institusi keagamaan, termasuk pendidikan Islam, dengan situasi sosial-politik, kita dapat mengenali pentingnya adaptasi dan respons terhadap perubahan. Hal ini tidak hanya relevan untuk menjaga kelangsungan hidup institusi, tetapi juga untuk memastikan bahwa pendidikan Islam dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Sebagai hasilnya, institusi keagamaan dan pendidikan Islam dapat menjadi lebih responsif, relevan, dan berdaya tahan dalam menghadapi dinamika kompleks masyarakat di mana mereka beroperasi.

Pertemuan politik dan pendidikan Islam telah menjadi panggung bagi konflik dan kesepakatan yang bergulir terus-menerus. Terkadang, aliansi antara politik dan pendidikan Islam mampu memberikan keuntungan dan dukungan yang signifikan bagi perkembangan kedua bidang tersebut. Namun demikian, sejarah juga mencatat kejadian-kejadian di mana keterlibatan politik justru membawa dampak merugikan dan menyulitkan perkembangan pendidikan Islam. Penting untuk dicatat bahwa pergumulan antara politik dan pendidikan Islam tidaklah statis; ia merupakan refleksi dari dinamika sosial-politik yang selalu berubah seiring waktu. Dalam beberapa periode sejarah, kebijakan politik dapat membuka pintu bagi kemajuan pendidikan Islam, sementara pada saat lain, intervensi politik dapat menjadi hambatan dan menimbulkan tantangan.

Melalui pemahaman mendalam terhadap hubungan ini, kita dapat meresapi kompleksitas perjalanan sejarah yang membentuk wajah pendidikan Islam. Dari sini, kita dapat mengeksplorasi pelajaran berharga untuk masa depan, mengidentifikasi strategi yang lebih efektif dalam menyatukan kepentingan politik dan pendidikan Islam agar mampu bersinergi demi kemajuan bersama. Sebuah kajian lebih mendalam terhadap pergumulan ini tidak hanya membuka tabir sejarah, tetapi juga membuka jalan bagi refleksi dan inovasi dalam membentuk masa depan yang lebih cerah bagi pendidikan Islam di tengah dinamika perubahan sosial-politik yang terus berkembang.

M. Sirozi (2015) dalam bukunya *Politik Pendidikan* menjelaskan bahwa antara pendidikan dan politik atau sebaliknya, adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik di setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. sering dilihat sebagai bagian-bagian yang terpisah, tidak memiliki hubungan apa-apa, padahal keduanya saling menunjang, bahu membahu dalam proses pembentukan masyarakat. bahwa pendidikan dan politik sebenarnya saling melengkapi satu sama lain, bekerja bersama dalam satu kesatuan yang harmonis. Pendidikan dianggap sebagai pilar fundamental dalam membentuk individu dan masyarakat, sementara politik memainkan peran kunci dalam menciptakan kerangka kebijakan yang memengaruhi sistem pendidikan. Kedua elemen ini, tanpa disadari, berkontribusi secara bersamaan dalam memandu arah perkembangan sosial.

Dalam eksplorasi kajian ini, penulis berupaya menghadirkan topik yang signifikan dengan judul "Pengaruh Dan Tantangan Pendidikan Agama Islam Dalam Dinamika Politik Di Indonesia." Pengaruh yang dimaksud dalam konteks ini (WJS. Poerwadarminta: 2014) merujuk pada keputusan dan langkah-langkah kebijakan pemerintah dalam memberikan perhatian atau dukungan, baik secara moril maupun materil, untuk mendukung kelangsungan pelaksanaan pendidikan Islam. Penulis mencatat bahwa perbincangan seputar perpaduan antara pendidikan Islam dan politik merupakan ranah yang luas dan kompleks.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian pustaka (library research) (Sugiyono: 2018), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa Al Qur'an, hadis, kitab, maupun hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Analisis

Politik terhadap pendidikan Islam di Indonesia

Kasus ini menggambarkan dengan sangat nyata bagaimana pemerintahan Orde Baru menjalankan kekuasaannya selama 32 tahun, di mana intervensi pemerintah melibatkan penyusunan kurikulum dengan menekankan subjek tertentu, seperti mata pelajaran Pancasila, dan melaksanakan indoktrinasi atau penataran, seperti program penataran P4. Semua ini merupakan bukti konkret bahwa pendidikan menjadi salah satu instrumen yang dimanfaatkan untuk melayani kepentingan politik penguasa.

Melalui pengaturan kurikulum yang menonjolkan subjek tertentu, pemerintahan Orde Baru berusaha untuk membentuk naratif dan persepsi yang sesuai dengan ideologi politik yang diusung. Selain itu, program indoktrinasi seperti penataran P4 bertujuan untuk mengarahkan pola pikir dan loyalitas masyarakat sesuai dengan narasi politik yang diinginkan oleh pemerintah.

pendidikan bukan hanya menjadi sarana untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga menjadi alat yang digunakan untuk membentuk pandangan dunia dan loyalitas terhadap penguasa. Kasus ini menunjukkan bahwa pendidikan dapat menjadi instrumen yang sangat kuat dalam mendukung agenda politik suatu pemerintahan, sekaligus mencerminkan sejauh mana kebijakan pendidikan dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik penguasa.

Generasi politik yang memimpin bangsa selama periode Orde Baru tumbuh dalam konteks di mana kualitas pendidikan sudah mulai merosot. Ekspansi sistem pendidikan yang terjadi begitu cepat pada saat itu, tanpa pengawasan dan persetujuan yang memadai, telah mengakibatkan penurunan mutu sekolah-sekolah. Penurunan ini dipicu oleh keterbatasan elit pendidikan pada waktu itu yang harus melibatkan diri secara maksimal untuk mendukung ekspansi sistem pendidikan yang berlangsung begitu cepat.

Situasi ini menciptakan tantangan serius, karena pertumbuhan pesat dalam jumlah lembaga pendidikan tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas. Elit pendidikan yang jumlahnya terbatas menjadi tertarik untuk menjaga kualitas pendidikan, namun keterbatasan sumber daya manusia dan waktu yang panjang untuk mencapai cakupan yang luas memperumit upaya tersebut.

Pandangan (Mochtar Buchori: 2000) ini menggambarkan bagaimana kondisi pendidikan saat itu tidak selaras dengan kecepatan pertumbuhan sistem pendidikan. Penekanan pada ekspansi tanpa memperhatikan kualitas menciptakan tantangan serius bagi generasi politik yang tumbuh di bawah naungan Orde Baru. Kesadaran akan permasalahan ini menjadi penting untuk merespons tantangan serupa di masa mendatang dan memastikan bahwa pertumbuhan sistem pendidikan selalu diiringi dengan upaya yang serius untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Pada era Orde Baru, birokrasi dianggap sebagai sarana yang efektif untuk melakukan intervensi dalam berbagai aspek kehidupan bernegara. Eksistensi para penguasa menjadi fokus utama pemerintahan, sehingga intervensi yang dilakukan oleh penguasa terhadap semua aspek kehidupan bernegara dianggap sebagai instrumen penting untuk memastikan keberlanjutan dan kelangsungan pemerintahan. Dampak dari sistem sentralisasi ini menciptakan sikap apatis di kalangan cendekiawan dan seluruh lapisan masyarakat, menghambat kemampuan mereka untuk berpikir secara demokratis, kritis, dan kreatif.

Birokrasi tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai alat kontrol yang digunakan oleh penguasa untuk mengawasi dan mengendalikan semua aspek kehidupan masyarakat. Sikap apatis yang muncul di kalangan cendekiawan dan masyarakat umum dapat dipahami sebagai respons terhadap dominasi pemerintah yang cenderung sentralistik dan otoriter.

Keengganan untuk berpikir secara demokratis, kritis, dan kreatif dapat dianggap sebagai dampak dari kendala-kendala yang diberlakukan oleh sistem pemerintahan pada waktu itu. Dengan demikian, memahami dinamika ini dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang bagaimana kebijakan sentralisasi pada masa itu memengaruhi budaya

berpikir dan partisipasi masyarakat, serta menimbulkan dampak pada perkembangan demokrasi dan kreativitas intelektual.

Sistem pemerintahan Orde Baru menjadi penghalang bagi timbulnya gerakan oposisi sebagai alat kontrol sosial terhadap pemerintahan atau penguasa. Oposisi dalam suatu negara demokratis dianggap sebagai suatu keharusan politik yang harus mendapatkan perhatian signifikan. Di Indonesia, gerakan oposisi dianggap oleh penguasa sebagai ancaman terhadap eksistensi mereka, sehingga setiap munculnya gerakan oposisi selalu dihadapi dengan kecurigaan yang didukung oleh pendekatan otoritarian.

Peran oposisi sebagai mekanisme kontrol sosial yang sehat dan kritis menjadi terhambat oleh pandangan penguasa yang melihat oposisi sebagai pemberontakan terhadap kekuasaan yang ada. Sikap otoritarian yang mendukung penguasa membuat munculnya gerakan oposisi selalu dianggap sebagai potensi ancaman, sehingga setiap langkah gerakan oposisi sering kali diawasi dan dihadapi dengan kecurigaan yang berlebihan.

Pentingnya peran oposisi dalam suatu sistem demokratis untuk mengawasi dan memberikan kritik konstruktif terhadap pemerintahan tidak sepenuhnya diakui dalam sistem pemerintahan Orde Baru ini. Dalam kerangka ini, pemahaman terhadap dinamika antara penguasa dan oposisi dapat memberikan perspektif yang lebih kaya tentang bagaimana keterbatasan sistem pemerintahan tersebut mempengaruhi perkembangan demokrasi dan partisipasi politik di Indonesia pada masa tersebut.

Berbeda dengan pernyataan sebelumnya kasus yang sama terjadi dimana masih terdapatnya pemimpin kita baik dalam skala nasional maupun daerah menjadikan pendidikan (apalagi pendidikan Islam) sebagai komoditas politik, sehingga "tema-tema" pendidikan kadang menjadi slogan politis dalam upaya melanggengkan kekuasaannya, entah dalam kasus masih dalam pemerintahannya maupun ketika menjelang Pilkada.

Fenomena ini mencerminkan bagaimana pendidikan, yang seharusnya menjadi instrumen untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sering kali dimanipulasi untuk kepentingan politik. Pemimpin menggunakan isu pendidikan, khususnya pendidikan Islam, sebagai sarana untuk mencapai dukungan politik, terutama ketika mendekati periode pemilihan umum.

Pendekatan ini mencakup penggunaan tema-tema pendidikan sebagai bagian dari kampanye politik untuk membangun citra positif dan mendapatkan dukungan publik. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat menciptakan ketidakseimbangan antara pembangunan pendidikan yang substansial dan pemanfaatan isu pendidikan sebagai alat politik.

Pentingnya menyadari dinamika ini adalah agar masyarakat dapat memahami bagaimana pendidikan, termasuk pendidikan Islam, sering kali menjadi korban dari agenda politik. Dengan pemahaman ini, diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih kritis dan selektif dalam menilai kebijakan pendidikan yang diusung oleh para pemimpin, sehingga pendidikan dapat diarahkan secara benar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Terkadang kalangan pendidik sering melupakan bahwa salah satu aspek penting dalam pendidikan Islam adalah dimensi politik. Dalam dimensi ini, tergambar hubungan yang melibatkan masyarakat dengan pemerintahan, interaksi antar negara, serta dinamika antarorganisasi, dan sebagainya. Hal ini menjelaskan bahwa pendidikan Islam memiliki keterkaitan yang erat dengan ranah politik, dan keduanya sulit untuk dipisahkan.

Pentingnya memahami dimensi politik dalam pendidikan Islam bukan hanya sebatas pengetahuan teoritis, tetapi sebagai landasan untuk membekali peserta didik dengan pemahaman yang mendalam tentang hubungan sosial dan politik dalam konteks ajaran Islam. Dengan memahami keterkaitan ini, pendidik dapat merancang kurikulum yang tidak hanya menekankan aspek keagamaan, tetapi juga memperkuat pemahaman tentang tanggung jawab sosial dan politik dalam masyarakat.

Pentingnya dimensi politik dalam pendidikan Islam menjadi panggilan untuk mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam konteks kehidupan sosial dan politik. Sehingga, peserta didik tidak hanya diarahkan untuk menjadi individu yang beriman, tetapi juga menjadi warga masyarakat yang berkontribusi aktif dalam membangun tatanan sosial dan politik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam sejarah, hubungan antara pendidikan dengan politik (James. S. Coleman ditulis oleh Sipriyanto dalam H. abuddin Nata: 2001) bukanlah suatu hal yang baru. Sejak zaman Plato dan Aristoteles, para filsuf dan pemikir politik telah memberikan perhatian yang cukup intens terhadap persoalan politik. Kenyataan ini misalnya ditegaskan dengan ungkapan "*Asis the state, sois the school*", atau "*what you wans is the state, tou must put into the school*" selain terdapat teori yang dominan dalam demokrasi yang mengasumsikan bahwa pendidikan adalah sebuah korelasi bagi suatu tatanan demokratis.

Dalam sejarah Islam misalnya, hubungan antara pendidikan dengan politik dapat dilacak sejak masa- masa pertumbuhan paling subur dalam lembaga- lembaga pendidikan Islam. Sepanjang sejarah terdapat hubungan yang amat erat antara politik dengan pendidikan. Kenyataan ini dapat dilihat dari pendirian beberapa lembaga pendidikan Islam di Timur Tengah yang justru disponsori oleh penguasa politik. Contoh yang paling terkenal adalah madrasah Nizhamiyah di Bagdad yang didirikan sekitar 1064 oleh Wazir Dinasti

Saljuk, Nizham al- Mulk. Madrasah ini terkenal dengan munculnya para pemikir besar. Misalnya, Al- Ghozali sempat mentransfer pengetahuannya di lembaga ini, yakni menjadi guru. Di Indonesia, munculnya madrasah (M. Dawam Rahardjo: 1993) merupakan konsekuensi dari proses modernisasi surau yang cenderung di sebabkan oleh terjadinya tarik menarik antara system pendidikan tradisional dengan munculnya lembaga pendidikan modern dari Barat. Namun, disadari oleh Ki Hajar Dewantara bahwa peran ulama telah melahirkan system budaya kerakyatan yang bercorak kemasyarakatan dan politik, disamping spiritual. Hal ini terbukti bayangkanya para alumni pesantren yang melanjutkan studi ke universitas terkemuka baik di dalam maupun di luar negeri.

Madrasah di Indonesia yang dikelola oleh suatu organisasi social kemasyarakatan banyak dipengaruhi oleh orientasi organisasinya. Madrasah yang didirikan oleh Muhammadiyah lebih bersifat ala Muhammadiyah. Demikian halnya dengan madrasah yang dikelola oleh NU orientasi pendidikannya lebih menitik beratkan pada kemurnian mazhab.

Dampak dari keragaman orientasi pendidikan ini menciptakan ragam tokoh, baik dalam kapasitas formal maupun informal, yang memiliki pemikiran dan arus politik yang beragam. Ada yang mengadopsi pemikiran modernis, fundamentalis, tradisional, hingga nasionalis. Walaupun perilaku politik seorang tokoh tidak semata-mata ditentukan oleh satu institusi pendidikan tertentu dan masih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti lingkungan, sosiokultural, potensi berpikir, dan lainnya, namun pengaruh suatu lembaga pendidikan memiliki peran yang cukup signifikan dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang, serta membekali mereka dengan paradigma berpikir yang beragam.

Variabilitas dalam pendekatan pendidikan menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan perkembangan beragam pandangan dan sikap politik di tengah masyarakat. Meskipun faktor-faktor eksternal turut berperan, institusi pendidikan tetap menjadi katalisator penting yang membentuk landasan karakter dan perspektif individu. Inilah yang menjadikan pendidikan sebagai elemen krusial dalam membentuk pola berpikir dan orientasi politik suatu generasi.

Melalui reformasi yang berlangsung, (Deliar Noer: 1983) kita dihadapkan pada kesempatan berharga untuk mengukuhkan kembali prinsip-prinsip demokratisasi yang terhimpun dalam semangat perubahan. Pendidikan, sebagai salah satu pilar pembentukan masyarakat yang demokratis, memiliki peran yang sangat vital dalam mengembalikan visi pendiri bangsa seperti yang tercantum dalam konstitusi. Konsep "mencerdaskan kehidupan bangsa" menjadi panggilan untuk menetapkan pendidikan sebagai sarana tidak hanya untuk peningkatan intelektualitas, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi.

Upaya dalam merestorasi peran pendidikan sesuai dengan tujuan konstitusi mencakup pembaruan kurikulum, pemberdayaan guru sebagai agen perubahan, dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan karakter demokratis. Melalui pendekatan ini, pendidikan dapat menjadi motor penggerak dalam membentuk masyarakat yang cerdas, beretika, dan partisipatif dalam proses demokratisasi.

Pembenahan secara fundamental terhadap sistem pendidikan nasional merupakan *conditiosine quainin* yang harus dimulai dari tataran yang paling dasar visi sampai dengan implementasi dalam kurikulum. Pada tataran paling dasar, tujuan pendidikan untuk membentuk kepribadian manusia Indonesia yang tercerahkan dan memiliki tanggung jawab, merupakan substansinya. Dengan landasan visi seperti ini, maka pendidikan tidak lagi hanya ditujukan untuk memproduksi manusia terpelajar dan berkeahlian demi melayani keperluan pasar tenaga kerja manusia yang di kuasai oleh kehendak untuk mengontrol, mengeksploitasi, dan berkuasa, tetapi yang di pentingkan adalah pertumbuhannya manusia berbudaya yang dapat menghayati dan memahami kehidupan bersama, sebagai komunitas mengada (*the community of being*) yang saling terkait satu sama lain dan karena salingmenjaga dan membuahkan mengeksploitasi.

#### Hubungan Pendidikan Islam dengan Penguasa

Penguasa dalam konteks ini, sering diidentifikasi dengan pemerintah yang merupakan organisasi yang memiliki kewenangan untuk merumuskan dan melaksanakan hukum atau kebijakan di wilayah yang mereka kuasai. Pada masa klasik, ulama menduduki peran yang sangat penting dalam Islam dan di antara komunitas Muslim. Dalam banyak aspek, mereka dihormati sebagai figur yang menduduki posisi dan otoritas keagamaan setelah Nabi Muhammad sendiri.

Kehadiran ulama pada masa klasik Islam (Deliar Noer: 1983) tidak hanya menjadi pemuka agama tetapi juga penjaga keadilan dan moralitas dalam masyarakat. Mereka diakui sebagai penjaga dan pemegang otoritas agama yang memberikan bimbingan dalam hal hukum, etika, dan spiritualitas kepada umat. Selain sebagai cendekiawan keagamaan, ulama juga sering berperan dalam memberikan nasihat kepada penguasa atau pemerintah, bertindak sebagai penasehat moral, dan berkontribusi dalam pembentukan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks ini, hubungan antara ulama dan penguasa tidak hanya sekadar administratif, tetapi juga mencakup dimensi etis dan spiritual.

Meskipun peran ulama mungkin berubah seiring waktu dan dalam berbagai konteks sejarah, pengakuan terhadap peran mereka dalam membentuk arah moral dan keadilan dalam masyarakat tetap menjadi warisan berharga. Pada intinya, keberadaan ulama pada

masa klasik dan sepanjang sejarah Islam mencerminkan pentingnya keterkaitan antara otoritas keagamaan dan pemerintahan untuk membentuk masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, etika, dan spiritualitas.

Salah satu hadis Nabi yang paling populer menyatakan bahwa ulama adalah pewaris para Nabi. Al-'ulama' waratsah al-anbiya' Karenanya mereka sangat dihormati kaum Muslimin lainnya, dan pendapat-pendapat mereka dianggap mengikat dalam berbagai masalah, yang bukan hanya terbatas pada masalah keagamaan saja, melainkan dalam berbagai masalah lainnya. Pentingnya ulama dalam masyarakat Islam terletak pada kenyataan bahwa mereka dipandang sebagai penafsir-penafsir legitimate dari sumber-sumber asli ajaran Islam, yakni al-Qur'an dan Hadis. Dikarenakan pengetahuan agama yang mendalam dan ketinggian akhlak, ulama bergerak pada berbagai lapisan sosial.

Mereka memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar dalam masyarakat. Oleh karena itu juga pengetahuan termasuk pengetahuan agama yang dimiliki ulama adalah suatu kekuatan pencipta dan pembentuk; pengetahuan (knowledge) dan kekuatan (power) berkaitan erat sekali, dan konfigurasi keduanya merupakan kekuatan yang tangguh atas masyarakat. Pernyataan itu terlepas dari apakah ulama menuntut ilmu pengetahuan demi kekuatan yang dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bidang kehidupan ataupun tidak, konsepsi masyarakat tentang tingginya nilai yang melekat pada pengetahuan agama telah memberikan dasar yang kuat bagi kontinuitas legitimasi kekuatan dan pengaruh moral ulama.

Namun, melihat sejarah Islam, sebagian besar ulama, karena alasan doktriner dan teologis, cenderung enggan untuk langsung terlibat dalam ranah politik. Kekuatan dan pengaruh mereka lebih sering diungkapkan secara politik dan intelektual melalui sikap teguh dan kewaspadaan untuk memastikan bahwa penguasa dan masyarakat beroperasi sesuai dengan pemahaman atau interpretasi mereka terhadap ajaran Islam. Mengingat kekuatan dan pengaruh ulama, tidak mengherankan jika penguasa Muslim dari waktu ke waktu berupaya dengan berbagai cara untuk menaklukkan dan menempatkan mereka di bawah otoritas kekuasaan politik.

Tidak jarang terjadi upaya dari penguasa untuk membatasi kemerdekaan ulama, terutama ketika pandangan atau fatwa yang diungkapkan oleh ulama tidak sejalan dengan kebijakan politik yang diinginkan oleh penguasa. Sejarah mencatat berbagai upaya untuk meredam kebebasan ulama, baik melalui kooptasi atau penindasan, sebagai respons terhadap kekhawatiran akan pengaruh dan otoritas mereka dalam membentuk pandangan masyarakat dan opini politik. Dalam situasi ini, peran ulama tidak hanya menjadi pemuka agama tetapi juga penjaga kemerdekaan intelektual dan moral di tengah-tengah kekuasaan

politik. Meskipun ada dinamika dan pergeseran dalam hubungan antara ulama dan penguasa sepanjang sejarah Islam, peran ulama sebagai penjaga nilai-nilai dan panduan moral tetap memainkan peran sentral dalam pembentukan dan perkembangan masyarakat Muslim.

Ketika Nabi masih hidup di tengah-tengah masyarakat di Madinah ada sebagian dari warga masyarakat yang mengabdikan dirinya untuk memperdalam ilmu-ilmu agama. Di Madinah, tercatat sekelompok orang yang suka duduk di luar (emperan) masjid Madinah untuk menggali dan mendiskusikan pengetahuan agama yang dikenal sebagai ahl al-Shuffah. Disamping kelompok ini ada pula perseorangan yang memperdalam spesialisasi tertentu dalam bidang keagamaan dan menjadi cikal bakal lahirnya kelompok ulama di tengah-tengah masyarakat Muslim, yang baru muncul sebagai kelas tersendiri pada abad ke-9. Di samping itu, pemerintah juga berperan sebagai lembaga atau organisasi yang menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan.

#### Hubungan Pendidikan Islam dengan Kekuasaan

Pendidikan Islam pada masa-masa awal (Ahmad Amin: 2015), terutama pada zaman Nabi dan para sahabat, diterapkan secara khusus di Masjid. Ahmad Amin, sejarawan Islam kontemporer, mencatat bahwa pusat-pusat pendidikan Islam pada periode tersebut berlokasi di Hijaz, dengan pusat utama di Makkah dan Madinah; di Irak, pusatnya berada di Basrah dan Kufah; serta di Damaskus. Setiap daerah ini diwakili oleh para sahabat terkemuka yang menjadi tokoh sentral dalam menyampaikan dan mengajarkan ajaran Islam.

Pada masa keemasan Islam, yang terjadi selama pemerintahan Abbasiyah, pusat pendidikan Islam dipusatkan di Baghdad, khususnya di Bait al-Hikmah. Sementara itu, di masa pemerintahan Islam di Spanyol, fokus pendidikan Islam berada di Universitas Cordova di bawah pemerintahan Abdurrahman III, yang dikenal dengan gelar Al-Dahil. Di Mesir, pusat pendidikan Islam tertinggi berlokasi di Universitas al-Azhar, yang didirikan oleh Dinasti Fathimiyah. Inilah beberapa pusat pendidikan kunci yang menjadi perwakilan masa keemasan Islam, tempat di mana ilmu pengetahuan, seni, dan kemanusiaan berkembang pesat.

Pendidikan Islam saat ini mengalami perkembangan yang merata di berbagai negara di seluruh dunia, terlepas dari apakah negara tersebut mayoritas berpenduduk Muslim atau tidak. Di Indonesia, studi Islam diimplementasikan melalui lembaga-lembaga pendidikan tinggi khusus, seperti UIN (Universitas Islam Negeri), IAIN (Institut Agama Islam Negeri), dan STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri). Selain itu, sejumlah perguruan tinggi swasta juga turut menyelenggarakan pendidikan Islam, seperti Unissula (Universitas Islam Sultan

Agung) di Semarang dan Unisba (Universitas Islam Bandung) di Bandung. Ini mencerminkan inklusivitas pendidikan Islam di Indonesia, yang melibatkan berbagai lembaga untuk memberikan akses dan pilihan yang lebih luas kepada masyarakat.

Pendidikan Islam di negara-negara non Islam diselenggarakan di beberapa negara, antara lain di India, Chicago, Los Angeles, London, dan Kanada. Di Aligarh University India, Pendidikan Islam di bagi menjadi dua: Islam sebagai doktrin di kaji di Fakultas Ushuluddin yang mempunyai dua jurusan, yaitu Jurusan Madzhab Ahli Sunnah dan jurusan madzab syi'ah. Di Chicago, Kajian Islam diselenggarakan di Chicago University. Secara organisatoris, Pendidikan Islam berada di bawah Pusat Studi Timur Tengah dan Jurusan Bahasa, dan Kebudayaan Timur Dekat. Di lembaga ini, kajian Islam lebih mengutamakan kajian tentang pemikiran Islam, Bahasa Arab, naskah-naskah klasik, dan bahasa-bahasa non-Arab.

Di Amerika, studi Islam umumnya memberikan penekanan pada bidang studi seperti sejarah Islam (Jaih Mubarak Atang Abdul Hakim: 2014), bahasa-bahasa Islam selain bahasa Arab, sastra, dan ilmu-ilmu sosial terkait Islam. Pengembangan studi Islam di Amerika dikelola melalui Pusat Studi Timur Tengah dan Timur Dekat, yang berfungsi sebagai lembaga induk yang mengkoordinasikan penelitian dan pengajaran terkait dunia Islam. Ini mencerminkan upaya Amerika dalam mendukung pemahaman yang lebih mendalam terkait keberagaman, sejarah, dan kebudayaan Islam melalui pendekatan multidisiplin.

Pusat Studi Timur Tengah dan Timur Dekat di Amerika mencerminkan komitmen untuk menjembatani pemahaman yang lebih baik terkait dunia Islam. Di sini, studi Islam melibatkan penelitian dan pengajaran di berbagai disiplin ilmu, termasuk sejarah, bahasa, sastra, dan ilmu-ilmu sosial. Fokus ini memungkinkan mahasiswa dan peneliti untuk mendalami aspek-aspek kaya dan kompleks dari kebudayaan dan sejarah Islam.

Melalui pendekatan multidisipliner ini, pusat studi tersebut berperan dalam membuka cakrawala pengetahuan mengenai Islam, tidak hanya sebagai agama tetapi juga sebagai entitas sosial, budaya, dan intelektual yang berkembang. Studi Islam di Amerika bukan hanya memberikan wawasan akademis tetapi juga berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai dunia Islam, memupuk dialog antarbudaya, dan merangkul keberagaman dalam perspektif global. Dengan demikian, upaya ini menjadi sarana penting dalam membangun pemahaman saling menghormati dan menghargai di antara berbagai komunitas dan latar belakang budaya.

Pada periode berikutnya, yang dikenal sebagai orde lama, harapan baru muncul dalam dunia pendidikan Islam dengan didirikannya Departemen Agama pada tanggal 3 Januari 1946 melalui usulan dari Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang diterbitkan pada 11

November 1945. Pendidikan Islam mulai mengalami perubahan positif dengan adanya sejumlah kebijakan pemerintah melalui Departemen Agama yang secara langsung berkaitan dengan pengembangan pendidikan Islam. Hal ini membawa angin segar dan membuka peluang baru bagi perkembangan sistem pendidikan Islam di Indonesia.

Kehadiran Departemen Agama pada periode orde lama menandai langkah signifikan dalam upaya peningkatan pendidikan Islam di Indonesia. Sejak berdirinya pada tanggal 3 Januari 1946, departemen ini menjadi entitas yang berperan aktif dalam mengatur dan mengembangkan berbagai aspek pendidikan agama Islam di tanah air. Pemberian mandat kepada Departemen Agama melalui usulan KNIP pada 11 November 1945 membuka jalan untuk perumusan kebijakan yang mendukung pengembangan pendidikan Islam. Dengan demikian, berbagai langkah konkrit dapat diambil untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan Islam di seluruh wilayah Indonesia.

Melalui serangkaian kebijakan yang dirumuskan oleh Departemen Agama, para pemangku kepentingan di bidang pendidikan Islam dapat melihat adanya komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan peran agama Islam dalam pembangunan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, departemen ini menjadi sebuah garda terdepan dalam upaya memajukan dan memperkuat sistem pendidikan Islam, memberikan dampak yang signifikan pada perkembangan pendidikan di Indonesia.

Dalam era orde baru, dikenal sebuah kebijakan yang memiliki dampak signifikan dan masih terus dikenang dalam telinga umat Islam, terutama bagi para pengelola pendidikan Islam. Kebijakan tersebut adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yakni Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri, pada tahun 1975 dengan nomor SKB No. 06/1975, 037/U/1975, dan 36/1975. SKB ini diarahkan untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam di madrasah.

Selain itu, keberlanjutan perhatian terhadap pendidikan Islam diakui melalui Undang-Undang SISDIKNAS, yaitu UU No. 2 Tahun 1989. Undang-Undang ini membuktikan komitmen pemerintah untuk terus memajukan sistem pendidikan nasional, termasuk pendidikan Islam, dengan merumuskan kerangka kerja yang mendukung peningkatan mutu dan aksesibilitasnya. Melalui kebijakan-kebijakan ini, pemerintah menegaskan perannya dalam mengembangkan dan memperkuat sistem pendidikan Islam, mengakui pentingnya pendidikan agama dalam membentuk karakter dan moral generasi muda. Dengan demikian, era tersebut memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan pendidikan Islam di Indonesia.

Pada era reformasi, setelah kejayaan orde baru digulingkan oleh gerakan reformasi pada tahun 1998 dan munculnya berbagai tuntutan perubahan di berbagai sektor

kehidupan, termasuk pendidikan Islam, diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS). Undang-Undang ini memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perkembangan pendidikan Islam di Indonesia.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut, terjadi perubahan mendasar dalam kerangka regulasi pendidikan nasional, mencakup pula pendidikan Islam. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperkuat sistem pendidikan secara menyeluruh, termasuk pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan Islam. Pada gilirannya, hal ini membuka pintu lebar-lebar untuk kemajuan dan pengembangan pendidikan Islam yang lebih inklusif dan berdaya saing di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang multikultural.

## B. Pembahasan

### 1. Pengaruh Pendidikan Agama Islam dalam Politik Indonesia

- a. Identitas Agama dalam Politik: Pendidikan agama Islam memiliki peran signifikan dalam membentuk identitas politik di Indonesia. Partai-partai politik yang didasarkan pada nilai-nilai Islam sering kali memainkan peran penting dalam kebijakan dan dinamika politik.
- b. Pendidikan dan Ideologi Politik: Pendidikan agama Islam mempengaruhi cara individu memahami politik. Institusi pendidikan, mulai dari madrasah hingga universitas, memainkan peran penting dalam penyebaran ideologi politik yang berbasis agama.
- c. Pola Pikir dan Pandangan Politik: Pendidikan agama Islam memengaruhi pandangan politik individu, termasuk pemahaman terhadap isu-isu seperti demokrasi, hak asasi manusia, peran perempuan dalam politik, dan lainnya.

### 2. Tantangan dalam Pendidikan Agama Islam dan Politik

Pluralisme dan Toleransi: Tantangan utama dalam pendidikan agama Islam adalah menciptakan kesadaran akan pentingnya pluralisme dan toleransi dalam konteks politik yang beragam di Indonesia. Radikalisasi dan Ekstremisme: Pendidikan agama Islam juga dihadapkan pada tantangan radikalisasi dan ekstremisme, di mana interpretasi agama yang ekstrem dapat mempengaruhi politik dan mengancam stabilitas negara. Keterbatasan Kurikulum: Tantangan lainnya adalah keterbatasan dalam kurikulum pendidikan agama Islam yang mungkin tidak memadai untuk mengajarkan nilai-nilai kritis yang dibutuhkan dalam konteks politik modern.

### 3. Solusi dan Upaya Mengatasi Tantangan

Reformasi Kurikulum: Meningkatkan kurikulum pendidikan agama Islam untuk

mencakup nilai-nilai pluralisme, toleransi, dan kebebasan berpendapat. Pelatihan Guru: Memberikan pelatihan kepada guru-guru agama untuk mengajarkan pemahaman yang seimbang tentang agama Islam yang inklusif dan tidak ekstremis. Kolaborasi antara Pemerintah dan Lembaga Agama: Kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan otoritas agama dalam mempromosikan pemahaman yang lebih luas tentang agama Islam dan politik yang inklusif.

Artikel ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana pendidikan agama Islam memengaruhi dan dipengaruhi oleh dinamika politik di Indonesia. Dalam pembahasannya, penting untuk menampilkan perspektif yang seimbang dan menyeluruh untuk memahami tantangan serta solusi yang mungkin diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam melakukan penjelasan, artikel ini dapat menunjukkan pendapat dari berbagai ahli atau pemikir yang relevan. Juga, penting untuk mencantumkan perspektif dari berbagai lapisan masyarakat agar dapat menggambarkan keberagaman pandangan terhadap topik ini. Khususnya di Indonesia, di mana agama Islam memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari mengenai politik, pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara pendidikan agama Islam dan dinamika politik akan memberikan wawasan yang lebih baik tentang arah perkembangan sosial-politik di negara ini.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan mengenai pengaruh dan tantangan pendidikan agama Islam dalam dinamika politik di Indonesia maka terdapat pengaruh signifikan: Pendidikan agama Islam memiliki peran yang kuat dalam membentuk identitas politik individu dan kelompok di Indonesia. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam pendidikan agama mempengaruhi pandangan politik serta kebijakan yang diambil. Tantangan Pluralisme dan Radikalisme: Terdapat tantangan yang signifikan terkait dengan pendidikan agama Islam dalam mempromosikan pluralisme dan toleransi di tengah masyarakat yang beragam. Di sisi lain, pendidikan agama juga dihadapkan pada risiko radikalisme dan ekstremisme yang dapat mempengaruhi dinamika politik secara negatif. Relevansi Kurikulum dan Peran Institusi Keagamaan: Pentingnya mempertimbangkan relevansi kurikulum pendidikan agama Islam agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman dan mempromosikan nilai-nilai toleransi serta menghindari potensi radikalisme. Selain itu, peran institusi keagamaan dalam membentuk kebijakan politik dan opini publik juga perlu diperhatikan. Pentingnya Pendekatan Multiperspektif: Menyadari bahwa masyarakat Indonesia memiliki keberagaman pemahaman agama Islam, penanganan

terhadap pendidikan agama dalam politik haruslah inklusif dan mengakomodasi berbagai pandangan serta pemikiran yang ada. Pengaruh Terhadap Pemilih dan Kebijakan Politik: Studi tentang pengaruh pendidikan agama terhadap perilaku pemilih serta kontribusinya dalam pembentukan kebijakan politik menjadi penting untuk dipahami lebih lanjut guna merumuskan langkah-langkah yang lebih efektif dalam mengelola hubungan antara agama dan politik di Indonesia. Kesimpulan tersebut menunjukkan kompleksitas hubungan antara pendidikan agama Islam dan dinamika politik di Indonesia serta kebutuhan untuk pendekatan yang cermat dan inklusif dalam menghadapi tantangan yang muncul.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A. Malik fajar dalam M. Wahyuni Nafis, Dkk, *Di Dalam Sejarah Pendidikan Islam Maupun Dalam Studi Kependidikan, Sebutan 'Pendidikan Islam' Umumnya Difahami Sebatas Ciri Khas Jenis Pendidikan Yang Berlatar Belakang Keagamaan* (Jakarta: IPHI dengan Yayasan Wakaf Paramadina, 1995)
- Amin, Ahmad, *Dhuha Al-Islam* (Mesir: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2015)
- Atang Abdul Hakim, & Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam* (Bandung: Rosda Karya Offset, 2014)
- Buchori, Mochtar, *'Peranan Pendidikan Dalam Pembentukan Budaya Politik Di Indonesia' Dalam Sindhunata, Menggagas Paradigma Baru Pendidikan* (Yogtakarta: Kanisius, 2000)
- M. Sirozi, *Politik Pendidikan, Dinamika Hubungan Antara Kepentingan Kekuasaan Dan Praktik Penyelenggaraon Pendidikan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015)
- Nata, James.S.Colemanditulis oleh Supriyanto dalam H. Abudin, *Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2001)
- Noer, Deliar, *Administrasi Islam Di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Risalah, 1983)
- Rahardjo, M. Dawam, *Intelektual, Intelejensia Dan Perilaku Politik, Risalah Cendikiawan Muslim* (Bandung: Mizan, 1993)
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014)
- Zuhairini dan Abdul Ghafir, *Metodologi Pendidikan Agama Islam* (Malang: UM Press, 2014)